



Memperbarui Visi *Leapfrog* Indonesia di Tatanan Dunia Pasca-Pandemi

Oleh

Darynaufal Mulyaman¹, Ardhi Arsala Rahmani²

¹Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia

²Mahasiswa Doktorat di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

¹darynaufal.mulyaman@uki.ac.id, ²ardhiarsala@gmail.com

Pendahuluan: Tatanan *Leapfrogging* Klasik

Leapfrogging dapat dipahami sebagai strategi mengejar ketertinggalan di sektor industrialisasi dan konsep-konsep modern kehidupan manusia. Negara-negara berkembang sering mengambil strategi ini untuk melontarkan diri ke dalam bangsa yang lebih maju dan maju. Yayboke, Carter, dan Crumpler menjelaskan metode ini sebagai rentetan metode investasi dalam kemampuan, produksi, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk bertransformasi menjadi lebih maju dengan melewati beberapa tahap tradisional pembangunan.¹ Dengan demikian, melewati beberapa tahap proses pembangunan tradisional langsung ke teknologi atau pengembangan baru-baru ini dengan jalur alternatif adalah perspektif klasik *leapfrogging*.

Strategi ini memang diperlukan oleh negara-negara berkembang untuk dapat membawa kesejahteraan warganya di dunia yang terus bergerak maju. Ketika dunia memodernisasi, kesejahteraan berevolusi dan karakter kesejahteraan yang lebih baru ditambahkan setiap hari. Sederhananya, akses ke internet dianggap sebagai kesejahteraan yang dapat dicapai akhir-akhir ini. Yayboke, Carter, dan Crumpler juga menyebutkan bahwa sampel yang paling banyak dikutip dari apa yang disebut strategi *leapfrogging* adalah fenomena ponsel yang memungkinkan banyak negara berkembang untuk mengakses teknologi komunikasi seluler tanpa berurusan dengan teknologi komunikasi darat yang tepat terlebih dahulu. Terlepas dari peluang, beberapa negara di dunia, seperti Korea, tampaknya menjadi bukti nyata bahwa strategi ini dapat bekerja untuk pembangunan suatu negara.

Analisis: Pelajaran dari Korea Selatan

Keajaiban Korea Selatan di Sungai Han mendapatkan momentum ketika Korea Selatan akhirnya



bangkit dari abu Pendudukan Kekaisaran Jepang dan Perang Korea melalui investasi teknologi oleh pemerintah. Ekonomi Korea Selatan mengalami *booming* di sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang banyak diinvestasikan meskipun tidak memiliki inovasi yang tepat pada awalnya. Hal tersebut kemudian memberikan manfaat yang membuat Korea terjun ke tahap global bisnis internasional. Keun Lee dari UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) pada 2019 bahkan menyatakan bahwa berkat keberhasilan Korea Selatan dalam pengembangan teknologi melalui lompatan, membuat *leapfrogging* mendapatkan perhatian lebih, terutama di dunia berkembang.²

Selain itu, Sang M. Lee berpendapat bahwa faktor-faktor seperti iklim ekonomi global yang berkembang, kebijakan pemerintah, dan karakteristik budaya Korea yang membantu penyebaran TIK membuat *leapfrogging* di Korea adalah keberhasilan besar.³ Iklim ekonomi global yang berubah menjadi lebih bersatu ketika globalisasi tumbuh pada awal tahun 2000-an dimanfaatkan oleh pemerintah Korea sebagai upaya investasi besar di sektor teknologi, komunikasi, dan penelitian Korea pada waktu itu. Tidak hanya dukungan dari pemerintah, orang Korea juga mendukung lompatan yang telah diambil pemerintah mereka. Lee berpendapat bahwa masyarakat Korea juga sangat menginginkan pengukuran kinerja dan kecepatan, kemandirian diri, dan masyarakat milik yang berkembang untuk efektivitas. Dalam hal kesamaan kebijakan antara Korea Selatan sebagai negara yang baru maju, dan Indonesia sebagai negara berkembang (juga belum lagi bahwa kedua negara adalah ekonomi G20 dan MIKTA) yang sama-sama menggunakan strategi *leapfrogging* sebagai salah satu dari banyak instrumen pembangunan. Keduanya juga menggambarkan kemakmuran ekonomi sebagai prioritas kebijakan nasional utama dalam hal politik, yang berkaitan langsung dengan stabilitas nasional dan bahkan kebanggaan nasional. Namun, perbedaannya adalah bahwa satu kasus menunjukkan pencapaian dalam kebijakan *leapfrogging*-nya, sementara kasus lainnya memerlukan pengkajian ulang strategi mereka untuk mengejar pembangunan yang tertinggal di belakang.

Pandemi COVID-19 dan Kendalanya dalam Pembangunan

Seiring berjalannya waktu, negara-negara berkembang dihadapkan pada banyak tantangan untuk mengejar ketertinggalan, misalnya, Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuka kesenjangan perkembangan antara negara maju dan berkembang. Contoh paling sederhana untuk ini adalah perlombaan untuk vaksin yang didominasi oleh dunia yang kaya dan maju. Negara-negara di Asia (Asia Timur dan India adalah pengecualian) dan Afrika sudah menunggu akan vaksin untuk menyelamatkan populasi mereka dari virus COVID-19 dengan membelinya dari negara maju. Tidak





hanya itu, di masa pandemi, perekonomian juga terbebani berat di negara berkembang karena perdagangan internasional terhenti oleh berbagai kebijakan *lockdown* di seluruh dunia. Bahkan ini juga memengaruhi dunia yang maju. *Leapfrogging* dalam konteks pembangunan saat ini: Indonesia sebagai negara berkembang seolah diharuskan memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian infeksi. Di saat yang bersamaan, konsumsi dan ekspansi yang melambat membuat ekonomi semakin terpukul dan menjadikan tantangan yang lebih berat bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengejar ketinggalan — terutama karena mereka sudah tertinggal bahkan untuk memulai.

Namun, terlepas dari hambatan seperti itu, upaya untuk melompat telah dibuat seperti contoh Korea Selatan, terutama dengan kemajuan teknologi. Sejarah telah menyontohkan dengan meningkatnya teknologi seluler yang cepat di mana pengenalan ke pasar berkembang membuat teknologi kabel dilewati sepenuhnya. *Leapfrogging* dalam teknologi informasi telah memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengatasi iterasi teknologi yang ketinggalan zaman dengan cepat berturut-turut atau menghindari pengeluaran sama sekali — sehingga memungkinkan realokasi ke ekspansi teknologi yang lebih baru. Itu berarti keajaiban mengejar ketinggalan masih bersanding dengan ironi keterbelakangan dalam infrastruktur dasar dan pengembangan kelembagaan.⁴ Contohnya termasuk sanitasi di Indonesia—di mana bahkan di ibukota banyak daerah masih kekurangan akses ke fasilitas kebersihan dan sanitasi yang layak. Ini terlihat dengan keberadaan kelas-kelas menengah yang singgah di dalam pencakar langit dengan segala peralatan canggih mereka yang bersampingan dengan daerah kumuh yang masing-masing kekurangan air bersih.⁵

Kondisi kontras seperti itu membuat jelas hambatan dalam pendekatan tidak menyeluruh untuk melompat yang hanya berfokus pada kenaikan teknologi tanpa perhatian terhadap perkembangan manusia, budaya dan kelembagaan atau bahkan penyediaan dasar layanan publik. Upaya berpotensi untuk mengatasi hal ini sebenarnya dapat dilihat pada rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia saat ini ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru rencananya akan dibangun dari bawah ke atas dengan pelajaran perkembangan kontras di ibu kota lama sambil memperoleh karakter teknologi dan kelembagaan yang lebih baru yang mudah dipelajari dari negara-negara maju. Ini berarti bahwa ibu kota baru akan berfungsi sebagai implementasi *leapfrog* yang akan mencakup semua aspek di mana masyarakat yang selalu terhubung dengan teknologi canggih terbaru akan duduk berdampingan dengan masyarakat yang terpenuhi dalam penyediaan infrastruktur dasar.

Melalui permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka strategi *leapfrog* yang diperbarui





sepertinya tepat dan perlu untuk tidak berpusat pada teknologi. Gagasan strategi *leapfrog* alternatif ini tentunya tidak berarti bahwa perkembangan teknologi perlu diabaikan sepenuhnya. Sebagai gantinya, teknologi dapat dibagikan dan ditransfer alih-alih perlu dipelajari sehingga sumber daya yang difokuskan pada pembelajaran dapat dihabiskan di tempat lain, seperti pengembangan kelembagaan atau persyaratan infrastruktur lainnya. Ini tentu bukan juga berarti bahwa menerima transfer teknologi menghilangkan kapasitas belajar, tetapi pelajaran harimau Asia telah mengajarkan kita bahwa industri teknologi hanya menyalin dan menempelkan (yakni meniru, meniru, kemudian beradaptasi). Bahkan, negara-negara, seperti Republik Rakyat Tiongkok masih melakukannya sekarang tanpa tantangan yang signifikan terhadap masalah kekayaan intelektual dari rezim internasional. Dengan demikian, pemerintah kemudian mampu mengalihkan fokusnya pada bidang pembangunan lainnya.

Kesimpulan: Strategi Leapfrog Modern yang Tidak Berpusat pada Teknologi

Maka dari itu, keadaan *leapfrogging* terikat pada keterbatasan bahkan di tengah kondisi bisnis seperti biasa, seperti di masa pra-pandemi, dapat dimengerti kesulitan negara-negara berkembang dalam waktu dekat untuk kembali bergairah penuh dengan perkembangan pesat mereka — terutama karena mereka tertinggal dalam memulihkan kondisi kesehatan domestik untuk bahkan memulai pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, lebih banyak batu loncatan atau teratai air sejalan diperlukan untuk lompatan mereka dengan berbagai tingkat kesulitan. Tanggung jawab negara-negara maju yang telah menuai manfaat dari pembangunan masa lalu dan masih diistimewakan dengan efek majemuknya adalah memastikan bahwa negara-negara tertinggal tidak tertinggal sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada saat yang sama, negara-negara Barat mampu memberikan bantuan perkembangan yang sama dan dukungan penuh untuk negara-negara berkembang saat ini seperti yang terjadi pada negara-negara Asia sekutu Perang Dingin (seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang)—yaitu dengan penyediaan transfer teknologi tanpa syarat dan mengizinkan upaya menuju tiruan, replikasi dan upaya adaptasi ditambah dengan tingkat strategi perlindungan untuk memastikan peremajaan pasar domestik di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini karena kita tidak akan mampu melakukan lompatan yang sukses jika hanya sebagai pengguna. Hanya ketika kita menjadi pengguna, pelajar dan pencipta perkembangan teknologi kita kemudian dapat melompat tanpa tersandung. Kita saat ini sudah menjadi pengguna teknologi dari negara maju berkat mekanisme impor di pasar yang bebas, oleh karenanya langkah tepat berikutnya adalah menuntut mereka untuk memungkinkan kita menjadi pembelajar dan pencipta hal-hal yang mereka telah sodorkan.





THC INSIGHTS

No. 26 / 20 Mei 2021
www.habibiecenter.or.id

Endnotes

- ¹ Yayboke, Erol, William A. Carter, and William Crumpler. (2020). The Need for a Leapfrog Strategy. <https://www.csis.org/analysis/need-leapfrog-strategy>
- ² Keun Lee. (2019). Economics of Technological Leapfrogging. Department of Policy, Research and Statistics Working Paper 17/2019. United Nations Industrial Development Organization.
- ³ Lee, S. (2003). South Korea: From the Land of Morning Calm to ICT Hotbed. *The Academy of Management Executive* (1993-2005), 17(2), 7-18. Retrieved February 9, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/4165947>
- ⁴ Ufford, Stephen. (2021). Fast Lane to the Future: Three ways the 'leapfrog effect' is transforming developing countries – and revolutionizing finance. <https://nextbillion.net/fast-lane-to-thefuture/>
- ⁵ Shah, Tushaar et al. (2001). Limits to Leapfrogging: Issues in Transposing Successful River Basin Management Institutions in the Developing World. *Intersectoral Management of River Basin*. <https://publications.iwmi.org/pdf/H029115.pdf>





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id